

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dibidang pelayanan kesehatan dikarenakan zat yang dimiliki narkotika sangat ampuh menghilangkan rasa nyeri dan mengobati penyakit-peyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun impor demi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain dampak fosiif dari narkotika, narkotika juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya jika disalahgunakan bahkan menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) “ada 4-5 orang yang meninggal setiap harinya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, Hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘kelenger’ merujuk sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (fly), sedangkan dalam bahasa Inggris lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.<sup>2</sup>

Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut, mulai dari pemerintahan Orde Baru dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan (BAKOLAK) oleh Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 tahun 1971 yang salah satu tugasnya adalah menanggulangi bahaya Narkoba, kemudian disusul dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang narkotika. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-undang Narkotika mulai direvisi sehingga disusunlah Undang-undang Narkotika nomor 22 Tahun 1997 menyusul dibuatnya Undang-undang Psikotropika nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur - ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati dan berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Pada tahun 2002

---

<sup>2</sup> DR. Soedjono Dirdjosisworo S.H., 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3

BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional kemudian dilanjutkan dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang lebih mempertegas tugas dan wewenang BNN dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).<sup>3</sup>

Selain sanksi, aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum juga mempengaruhi bagaimana kekuatan hukum itu bekerja di dalamnya. Fungsi badan-badan ini sungguh penting. Coba bayangkan, jika Negara sudah tidak lagi mampu mempersembahkan keadilan bagi rakyatnya. Negara akan diselimuti kekalutan, korupsi, kejahatan, dan sebentar lagi akan menghadapi kehancuran.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang narkotika yang terbaru selain peraturannya lebih memperketat mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan memberikan kewenangan penyelidikan dan

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). *Sejarah BNN*. <http://www.bnn.go.id> Acces 27 April 2018

<sup>4</sup> Awaluddin Marwan. 2013. *Satjipto Raharjo Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Thafa Media: Semarang, hlm 262

penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat pula aturan-aturan yang dianggap sebagai kelemahan undang-undang tersebut seperti yang terdapat pada Pasal 54 undang-undang nomor 35 Narkotika Tahun 2009 Tentang Narkotika “ pecandu Narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial” dan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) hal ini yang sering dijadikan sebagai pelindung bagi penyalahguna narkotika melalui putusan hakim.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa *pengertian narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>5</sup>

1. Didalam Undang – Undang Narkotika Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :
  - b. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, h3roin, kokain, morfin, dan opium.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

- c. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
  - d. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.
2. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :
  - a. Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
  - b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
  - c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
  - d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid ) dan diazepam.
3. Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :
  - a. Rokok
  - b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
  - c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Undang-Undang Narkotika No. 22/1997 dan Undang-Undang Psikotropika No. 5/1997 mendefinisikan penyalah guna narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba (narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain) di luar dari kepentingan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan. Dan pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu

atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, selain tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya Undang-Undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.<sup>6</sup>

Kasus Narkotika juga sudah banyak masuk di dalam ruang lingkup pengadilan yang mana kasus sebagai Pengedar dan Penyalah guna yang selama ini sangat banyak di kota Surabaya jawa timur, ketika kasus narkotika ini masuk didalam pengadilan maka rentan Tuntutan jaksa penuntut umum dengan tuntutan pasal 111, 112 Undang – undang Narkotika sebagai Bandar dan Pengedar

---

<sup>6</sup>Erico Syanli Putra, Suwanto, 2013. Jurnal *Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika* Vol 3, No. 01 (2013) Fakultas Hukum Universitas Medan.

sedangkan terkadang dengan jenis dan berat yang dimiliki terdakwa tidak sama serta proses tertangkap nya pun berbeda maka tuntutan nya tetap dengan pasal 111, 112 Undang – Undang narkotika. Seperti Pada putusan yang ada di pengadilan negeri malang yang mana putusan nya hanya mengukur pasal yang sangat mudah untuk di buktikan seperti pasal 111, 112 Undang – Undang Narkotika yang Berbunyi : <sup>7</sup>

Pasal 111 Ayat (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Pasal 111 Ayat (2) *Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 112 ayat (1) : *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.*

Pasal 112 ayat (2) : *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.*

---

<sup>7</sup> Undang – Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pada pengangkatan judul ini maka penulis akan mengkaji terkait putusan – putusan hakim yang mana jaksa menuntut dengan pasal 112 undang – undang narkoba sedangkan berat netto yang terbukti hanya sebesar 0.06, 0,08 tidak sampai 1 gram, akan tetapi tidak di arahkan sebagai penyalah guna, sesuai pasal 127 undang – undang narkoba yang Berbunyi :

Pasal 127

1) Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan dan Pasal 103.

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Walaupun ada pembagian kategori pelanggaran dalam tindak pidana Narkoba tersebut, namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I secara melawan hukum) yang



diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.<sup>8</sup>

Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba untuk penggunaan narkoba harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Narkoba Golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan Narkoba Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 127 UU no 35 Tahun 2009 juga tanpa adanya ancaman pidana denda, Penyalahgunaan wewenang oleh aparat Penegak hukum dalam hal ini adalah dalam penerapan pasal, yang seharusnya Penyalahguna yang diancam dengan pasal 127 tetapi di jerat dengan pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009. Rumusan pasal 111 dan pasal 112 adalah sama yaitu (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) hanya dalam pasal 111 adalah untuk Narkoba jenis tanaman, sedang kan pasal 112 untuk narkoba bukan tanaman. Sedangkan dalam pasal 127 adalah penyalahgunaan. Yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkoba tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalaguna narkoba golongan I sebagaimana

---

<sup>8</sup> Wasis Priyanto, *penyalahgunaan atau kepemilikan* <http://waktuterindah.blogspot.co.id> diakses tanggal 1 Oktober 2017 pukul 13.00.

ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009.<sup>9</sup>

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria : <sup>10</sup>

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - 1 Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
  - 2 Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - 3 Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  - 4 Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  - 5 Kelompok Ganja seberat 5 gram.
  - 6 Daun Koka seberat 5 gram.
  - 7 Meskalin seberat 5 gram.
  - 8 Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
  - 9 Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
  - 10 Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
  - 11 Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
  - 12 Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
  - 13 Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
  - 14 Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  - 15 Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  - 16 Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c) Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009.

- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009.

Adapun barang bukti didalam persidangan yaitu berupa satu kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram dan berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram berdasarkan surat keterangan dokter polrestabes Surabaya nomer 593/IX/2015/Urkes pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat rapid Diagnostic test (Acon) terhadap terdakwa didapat kandungan methamphetamine (positif) artinya jelas bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk di gunakan oleh dirinya sendiri mengacuh kepada pasal 127 Undang – undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” tetapi di dalam putusan ini jaksa menuntut dengan tuntutan pasal 112 Undang – undang 35 Tahun 2009 “Tanpa Hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman” daripada itu penulis ingin menganalisa dengan penerapan pasal 127 yang mengarah kepada rehabilitas dan menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa.

Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) Tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk

melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta PP No.25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **PENERAPAN PASAL 127 UNDANG – UNDANG NOMER 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PEMAKAI / PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMER : 2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY** guna mengetahui bagaimana hukum dalam memberikan hukuman dalam tindak pidana narkotika yang pada saat ini selalu di hukum dengan kurungan tidak dengan rehabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualifikasi Pemakai/Pengguna didalam tindak Pidana Narkotika sesuai dengan fakta – fakta hukum di persidangan ?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika Oleh Hakim di dalam perkara pengadilan Nomer : 2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY ?

---

<sup>11</sup> Tatas Nur Arifin. *Jurnal Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*. 2013. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kualifikasi Pemakai/Paengguna Didalam pengadilan sesuai dengan fakta – fakta apakah sesuai dengan undang – undang 35 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika terhadap pihak yang terbukti sebagai penyalahguna atau pemakai/pengguna (Studi Putusan No : 2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis  
Dari penulisan hukum ini di harapkan semoga dapat memberikan tambahan wawasan ilmu dan dapat dijadikan refrensi di masa mendatang dalam penelitian sejenis.
2. Secara praktis  
Memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam perbuatan tindak pidana narkotika dan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana narkoba sehingga dapat memberikan masukan bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan dalam memutus suatu perkara khususnya narkoba.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Bahan Hukum**

#### **a. Primer**

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari undang – undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan pecandu narkoba, serta putusan pengadilan No. 2563/Pid.Sus/2015/PN.SBY.

#### **b. Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari seluruh publikasi di bidang hukum seperti jurnal hukum, kamus hukum serta literature berupa buku – buku dan komentar – komentar atas dakwaan jaksa.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang di angkat, mencari peraturan undang – undang yang berkaitan dengan kasus tersebut, dan melakukan penelusuran dan pencarian bahan – bahan melalui internet atau website dan buku untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

## 3. Analisis Data

Analisis terhadap bahan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisa yakni dengan penelitian deskriptif analisa mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis untuk di ambil kesimpulannya.

## G. Sistimatis Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan pokok-pokok pembahasannya secara tersendiri. Namun masih saling berhubungan dengan konteks penelitian ini. Dan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Secara sistematis, pembahasan akan dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut:



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistimatis Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini Terdiri dari konsep dan teori serta Pengertian tentang penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dan undang – undang narkoba nomer 35 tahun 2009.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan analisis putusan, kronologis kasusi, dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta hukum, putusan hakim dan analisis yuridis.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini dimana ditemukan jawaban berupa kesimpulan dari semua permasalahan yang penulis kemukakan dalam bab terdahulu, kemudian penulis memberikan saran- saran yang mudah-mudahan berguna bagi ilmu hukum.